



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDP PANJA PENDIDIKAN VOKASI KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2019 - 2020.
Masa Persidangan ke	: II (Dua).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI
Dengan	: Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Hari/Tanggal	: Senin, 27 Januari 2020.
Pukul	: 13.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SH,MH/Kabagset. Komisi X DPR-RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan sertifikasi profesi terhadap lulusan pendidikan vokasi jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;2. Peta daya saing tenaga kerja Indonesia di dalam dan di luar negeri;3. Dukungan BNSP terhadap percepatan sertifikasi dan kompetensi profesi, serta Percepatan pemberian lisensi bagi lulusan SMK;4. Pola koordinasi dan sinkronisasi untuk meningkatkan kerjasama antara Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri;5. Kendala yang ditemui dalam hal pemberian sertifikasi lulusan pendidik dan tenaga kependidikan SMK, serta pemberian lisensi bagi SMK.
Hadir	: 16 orang dari 29 Anggota Panja Pendidikan Vokasi Komisi X DPR-RI
Hadir BNSP	: Saudara Kunjung Masehat, SH, MM (Ketua BNSP) beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Vokasi Komisi X DPR-RI dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dibuka pada pukul 13.25 WIB oleh Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR-RI tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Ketua BNSP serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada BNSP yang telah menyampaikan penjelasan mengenai dukungan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Vokasi antara lain:
 - a. Kebijakan Sertifikasi Terhadap Lulusan SMK dalam melaksanakan INPRES 9 Tahun 2016 yaitu mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, serta sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK, juga mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.
 - b. Kebijakan Sertifikasi Terhadap Lulusan Perguruan Tinggi, yaitu pelayanan pembentukan LSP P1 di Perguruan Tinggi dan Politeknik, Pemenuhan Skema Sertifikasi di Perguruan Tinggi, Pemenuhan Asesor Kompetensi, Pembinaan dan Pengawasan.
2. BNSP menyampaikan beberapa hal, antara lain:
 - a. Kondisi ketenagakerjaan masih terjadi *mismatch* yang masih tinggi antara kebutuhan dan ketersediaan *skill* tenaga kerja.
 - b. Adanya potensi disrupsi dan terciptanya jenis pekerjaan baru akibat dari berkembangnya teknologi digital dan otomatisasi di dunia industri.
 - c. Adanya perbedaan penilaian antara Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
 - d. Masih terbatasnya jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi SMK dibandingkan dengan jumlah SMK.
3. Terhadap penjelasan dan paparan yang disampaikan BNSP, Panja Pendidikan Vokasi Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut:
 - a. Mendorong Pemerintah cq Kemendikbud RI, Kemenaker RI, K/L lain dan BNSP untuk melakukan kordinasi penataan regulasi, kurikulum, peningkatan pelayanan, sarana prasarana untuk peningkatan kualitas pendidikan vokasi di SMK dan Perguruan Tinggi.
 - b. Mendorong Pemerintah cq Kemendikbud RI melakukan evaluasi terhadap pengembangan pendidikan vokasi terutama mengenai peningkatan jumlah LSP SMK dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (guru & dosen) dalam pendidikan vokasi, serta memaksimalkan peran dan keterlibatan industri dalam peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

- c. Mendorong BNSP melakukan kajian terhadap akar permasalahan *mismatch* lulusan pendidikan vokasi dengan dunia usaha-dunia industri (DUDI), mengingat Kebijakan *Link and Match* sudah diimplementasikan sejak tahun 1993-1998 oleh Mendikbud.
- d. Panja Pendidikan Vokasi Komisi X DPR RI mendorong pemerintah cq Kemendikbud RI, Kemenaker RI dan BNSP untuk menyusun Kebijakan mengenai Sistem/Skema Pemagangan bagi peserta didik SMK dan Politeknik di dunia usaha dan industri.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.45 WIB

KETUA RAPAT,



Dede Yusuf Macan Effendi ST. M.I.Pol